



Ada Dana Hibah Masuk ke Rekening Perorangan

★ Inspektorat Terjunks Tim Khusus untuk Tarik Kembali

Sebanyak 11 dari 12 kelompok penerima hibah bermasalah sudah dilakukan penyelesaian di lapangan oleh Tim Sapu Jagat

DENPASAR, NusaBali Tim Sapu Jagat Inspektorat Provinsi Bali tingkatkan speed dalam menindaklanjuti perintah Gubernur Made Mangku Pastika untuk mengejar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Hibah dari APBD 2016. Hasilnya, terungkap ada 12 item hibah bermasalah. Salah satunya, realisasi pembangunan nol persen, sementara dana hibah yang dikucurkan pemerintah justru masuk ke rekening pribadi.

Kepala Inspektorat Provinsi Bali, I Ketut Teneng, mengatakan 12 item hibah yang ditemukan bermasalah ini persoalannya beragam. Mulai dari pembangunan fisik terealisasi hanya 50 persen, LPJ Hibah belum disetor, hingga realisasi pembangunan fisik nol persen alias dana bantuan tidak digunakan. Bahkan, ada satu hibah yang dananya semula masuk ke rekening BPD milik panitia kelompok penerima. Namun, realisasi pembangunan nol persen, sementara dana hibah dipindahkan ke rekening pribadi.

Kasus dana hibah dipindahkan ke rekening pribadi ini terjadi di Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Badung. Kelompok penerima hibah mengajukan proposal untuk bangun Palinggih Gedo-

12 ITEM HIBAH YANG DIKEJAR TIM KHUSUS INSPEKTORAT



- Pembangunan Palinggih Merajan Pura Dadia Sentana Dalem Tarukan di Desa Pakraman Sekumpul, Kecamatan Sawan, Buleleng
- Realisasi dana: Rp 50 juta
- Masalah: pembangunan fisik sebelum dana diterima



- Pipanisasi di Desa Antapan, Kecamatan Baturiti, Tabanan
- Realisasi dana: Rp 75 juta
- Masalah: pembangunan fisik nol persen

- Pelaksanaan kegiatan Majelis Alit Desa Pakraman (MADP) Kecamatan Penebel, Tabanan
- Realisasi dana: Rp 50 juta
- Masalah: realisasi kegiatan rendah

- Pelaksanaan kegiatan Majelis Alit Desa Pakraman (MADP) Kecamatan Baturiti, Tabanan
- Realisasi dana: Rp 50 juta
- Masalah: realisasi kegiatan rendah



- Finishing Bale Banjar Petengan Gede, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara
- Realisasi dana: Rp 50 juta
- Masalah: pembangunan fisik sebelum dana diterima

- Pembangunan Parahyangan dan Penyengker di Banjar Pantisari, Desa Pemecutan Kaja, Denpasar Utara
- Realisasi dana: Rp 100 juta
- Masalah: pembangunan fisik nol persen



- Pembangunan Bale Pasamuhan Pura Dadia Pasek Gelgel di Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Bangli
- Realisasi dana: Rp 25 juta
- Masalah: pembangunan fisik nol persen

- Pembangunan Penyengker Pura Padang Luah di Desa Pakraman Pemenang, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung
- Realisasi dana: Rp 25 juta
- Masalah: peruntukan tidak sesuai dengan SK Gubernur



- Pembangunan Palinggih dan Penyengker Pura Paibon Sentana Pasek Prateka, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung
- Realisasi dana: Rp 50 juta
- Masalah: pembangunan fisik nol persen

- Rehab Palinggih di Pura Alit Pasek Gelgel, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung
- Realisasi dana: Rp 20 juta
- Masalah: realisasi pembangunan fisik rendah

- Pembangunan Palinggih dan Penyengker Pura Ibu Pasek Gadung, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung
- Realisasi dana: Rp 75 juta
- Masalah: pembangunan fisik nol persen

- Pembangunan Gedong Pura Dalem Ratu Buda, Desa Pakraman Tegai, Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Badung
- Realisasi dana: Rp 15 juta
- Masalah: pembangunan fisik nol persen, dana masuk rekening pribadi

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1



Ada Dana Hibah Masuk ke Rekening Perorangan

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

ng di Pura Ratu Buda, Desa Darmasaba. Dana hibah yang diusulkan sesuai dengan rencana anggaran pembangunan adalah Rp 102.450 miliar.

Dari usulan hibah itu, Pemprov Bali hanya mengucurkan bantuan sebesar Rp 15 juta. Bantuan hibah Rp 15 juta tersebut ditransfer Biro Keuangan Setda Provinsi Bali ke rekening BPD milik kelompok penerima dari panitia pembangunan Palinggih Gedong Pura Ratu Buda.

Setelah dicek Tim Sapu Jagat ke lapangan, ternyata realisasi pembangunan Palinggih Gedong nol persen alias tak ada pembangunan apa pun. Dana Rp 15 juta yang semula ditransfer Biro Keuangan ke rekening BPD Bali pun ternyata sudah dipindahkan ke rekening pribadi.

"Kita sudah kerahkan Tim Khusus (Timsus) Inspektorat berkekuatan 5 orang untuk kejar ke lapangan dan per-

intahkan tarik kembali dana hibah Rp 15 juta itu. Apalagi, sudah ada laporan dana hibah itu dipindahkan ke rekening pribadi?" ujar Ketut Teneng saat mendampingi Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengumpulkan para Kepala Inspektorat Kabupaten/Kota se-Bali di Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Niti Mandala Denpasar, Jumat (3/2) pagi.

Menurut Ketut Teneng, kalau dana hibah tersebut tidak diambil kembali dan menjadi temuan BPK, urusannya jadi panjang. "Ketimbang urusannya ke ranah hukum, ya kita ambil langkah. Apalagi, sudah ada bukti dana yang dicairkan Biro Keuangan dipindahkan ke rekening pribadi. Itu sudah ada itikad tidak baik," tandas Teneng.

Apakah kelompok penerima hibah pembangunan Palinggih Gedong Pura Ratu Buda, Desa Darmasaba bodong? "Kalau bodong, saya rasa tidak. Nama kelompok pembangunan pura di desa

itu memang ada. Hanya saja, realisasinya nol persen. Dananya sudah diterima per 31 Desember 2016 lalu, masuk kerekening BPD Bali kelompok tersebut. Tapi, tidak ada LPJ BHibah dan tak ada realisasi pembangunan," kata tegas birokrat asal Desa Les, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.

Sementara itu, 11 kelompok penerima hibah bermasalah lainnya sudah dilakukan penyelesaian di lapangan oleh Tim Sapu Jagat Inspektorat Provinsi Bali. Menurut Inspektur Pembantu II Inspektorat Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Putra Wiradnyana, tinggal satu dari 12 item hibah bermasalah yang belum diselesaikan, yakni pembangunan Palinggih Gedong Pura Ratu Buda.

Putra Wiradnyana menyebutkan, pihak penerima hibah di Desa Darmasaba ini belum realisasikan pembangunan fisik, dengan alasan ada upacara keagamaan dan belum dapat tukang. "Namun,

yang menjadi masalah, adanya modus pemindahan dana ke rekening pribadi," jelas Putra Wiradnyana saat dikonfirmasi NusaBali terpisah, Jumat kemarin.

Dana hibah untuk masyarakat Bali dari APBD 2016, sebagaimana diberitakan, dianggarkan Pemprov Bali sebesar Rp 403,31 miliar. Jumlah proposal hibah yang diajukan masyarakat mencapai 6.729 item. Pencairan hibah sudah berakhir per 31 Desember 2016 lalu.

Dari anggaran sebesar itu, dana hibah yang terealisasi mencapai Rp 363,24 miliar (sebesar 90,07 persen), dengan realisasi proposal sebanyak 5.278 item. Sedangkan sisanya, sebanyak Rp 40,06 miliar (9,93 persen) atau setara dengan 1.451 proposal tidak dapat terealisasi. "Dari yang sudah masuk ke rekening, wajib dibuatkan LPJ oleh penerima hibah," tegas Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali, IB Ngurah Arda, beberapa waktu lalu. **nat**



Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Nelayan di Buleleng **Penyidik Tunggu Hasil Tim Marine**

DENPASAR, NusaBali

Meski menyatakan sudah ada kepastian terkait kerugian negara, hingga saat ini penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kapal untuk nelayan di Buleleng dari Kementerian Perikanan dan Kelautan. Malah kini penyidik kembali menunggu hasil dari tim marine Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI).

Kasipenkum dan Humas

Kejati Bali, Ashari Kurniawan mengatakan hasil pemeriksaan tim Marine KKP RI ini menyangkut spesifikasi dan kelayakan kapal. Dengan hasil tim marine KKP RI tersebut, akan melengkapi hasil instansi terkait. Pemeriksaan spesifikasi dan kelayakan kapal sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh Badan Klasifikasi Indonesia (BKI). Hasilnya, ditemukan banyak kejanggalan dalam pengadaan kapal tersebut.

Apakah penyidik belum

percaya diri dengan hasil pemeriksaan tersebut, Ashari menjawab diplomatis "Memang cukup panjang dan bertahap, namun pihak penyidik terus berupaya merampungkan segala tahapan yang harus dilalui," jelasnya Jumat (3/1). Terkait kerugian negara hasil gelar dengan BPKP (Badan Pengawas Keuangan Pembangunan) Wilayah Bali dan penetapan tersangka, Ashari masih enggan menyebutkan. "Yang jelas sudah dilakukan ekspose

dengan BPKP. Hasilnya kita tunggu saja," bebernya.

Seperti diketahui, penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan kapal ikan untuk nelayan di Buleleng sudah berjalan sekitar satu tahun. Dalam kasus ini, penyidik Pidsus Kejati Bali mendalami dugaan korupsi dalam pengadaan kapal untuk nelayan dari Kementerian Perikanan dan Kelautan senilai Rp 10 miliar. Dugaan awal, tujuh kapal yang dibuat tidak sesuai kesepakatan awal dengan

nelayan. Bahkan disebut ada kejanggalan dalam komponen dan piranti kapal yang jauh dari kata layak.

Informasi yang dihimpun, dalam kasus ini penyidik sudah menyiapkan dua calon tersangka. Namun belum diungkap siapa saja dua calon tersangka yang kabarnya sudah beberapa kali diperiksa penyidik. Dalam kasus ini, penyidik sudah memeriksa beberapa pejabat di Disnakanlut Bali, Disnakanlut Buleleng serta rekanan dari PT F1. **rez**

Edisi : Sabtu, 4 Feb 2017

Hal : 5



Krama Minta Stop Kasus Balai Banjar Lalang Pasek

Krama Lalang Pasek juga minta penangguhan penahanan terhadap I Nyoman Sukarya yang ditetapkan tersangka dan ditiptip di Lapas Kelas IIB Tabanan.



Perwakilan krama Banjar Lalang Pasek, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Tabanan diterima Kajari Tabanan, Atang Bawono (kiri), Jumat (3/2).

TABANAN, NusaBali

Sebanyak 50 orang krama Banjar Lalang Pasek, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri Tabanan, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan, Jumat (3/2). Mereka menyampaikan 5 aspirasi ke Kejari Tabanan, salah satunya minta hentikan kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah pembangunan Balai Banjar Lalang Pasek pada tahun 2008. Pasalnya, pembangunan Balai Banjar Lalang Pasek sudah pernah diaudit oleh Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Pemkab Tabanan dan Ketua Panitia Pembangunan.

Puluhan krama Banjar Lalang Pasek yang nglurug kantor Kejari Tabanan dipimpin I Made Arianta. Mereka datang dengan pengawalan pihak kepolisian. Kedatangan warga disambut langsung oleh Kepala Kejari Tabanan Atang Bawono bersama Kasi Pidsus Ida Bagus Alit Ambara. Enam orang perwakilan kemudian diterima untuk menyampaikan aspirasinya. Para perwakilan krama inilah yang kemudian menyampaikan lima poin aspirasi masyarakat.

Kelima aspirasi itu yakni meminta Kejari Tabanan menghentikan kasus dugaan penyalahgunaan hibah sebesar Rp 200 juta lebih untuk pembangunan Balai Banjar Lalang Pasek. Alasannya, dana hibah itu sudah diaudit oleh Bawasda bersama Ketua Panitia I Gede Tiasa. Hasil audit itu, pembangunan Balai Banjar Lalang

Pasek menghabiskan dana sebesar Rp 360 juta. Pertanggungjawaban keuangan sudah disampaikan pada paruman atau rapat adat.

Dalam paruman banjar itu, turut dihadiri dan disetujui oleh I Gusti Ngurah Putra Sarjana. Putra Sarjana sebelumnya pernah mendatangi Kejari Tabanan bersama 6 orang krama untuk mengusut aktor intelektual kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah. "Intinya warga tidak ada yang keberatan dan mempersoalkan apalagi bangunan balai banjar sudah selesai," ujar koordinator massa, I Made Arianta.

Bahkan mantan Kelian Adat I Nyoman Sukarya - telah ditetapkan tersangka dan ditahan di Lapas kelas IIB Tabanan - pada saat pembangunan balai banjar diberikan wewenang penuh dalam pengelolaan uang dan krama tidak ada yang mempersoalkannya. Kedua, sejak tahun 2008 sudah 3 kali pergantian kelian adat dan tidak ada yang mempersoalkan pembangunan balai banjar. Ketiga, sudah ada keputusan rapat untuk menghentikan kerjasama dengan pihak ketiga antara lain I Wayan Sukaja dan I Ketut Suwardiana karena diberhentikan sebagai anggota DPRD. Pada saat itu Sukaja dan Suwardiana sebagai donator pembangunan balai banjar.

Keempat, mengusut 7 orang krama yang mendatangi Kejari Tabanan pada tanggal 31 Januari 2017 yang meminta men-

cari dalam intelektual kasus penyalahgunaan hibah pembangunan balai banjar. "Kelima kami memohon Kejaksaan Negeri Tabanan menangguhkan penahanan dan atau membebaskan I Nyoman Sukarya," tandas Arianta. Dikatakan, sejak kasus ini mencuat timbul perpecahan di banjar padahal warga tidak ada yang melaporkan pembangunan balai banjar. Sebab seluruh krama tidak ada yang keberatan apalagi balai banjar sudah selesai. Rianta juga ucapkan terima kasih kepada Wayan Sukaja dan Ketut Suwardiana karena telah banyak membantu sampai terwujudnya balai banjar tahap I.

Terkait aspirasi krama Banjar Lalang Pasek, Kajari Tabanan Atang Bawono mengaku menampung aspirasi masyarakat. "Kasus dugaan penyelewengan dana hibah ini sudah pelimpahan tahap dua yang tinggal menunggu persidangan," terang Atang Bawono di hadapan perwakilan krama. Ia pun meminta penanganan kasus ini dibiarkan berjalan sesuai proses. Jika diberhentikan maka kasus akan menjadi lama. Terkait siapa yang melaporkan kasus ini, Kajari Atang Bawono mengatakan dalam penanganan kasus, Kejari Tabanan banyak informasi. "Jangan hanya berpikir ada yang melapor. Saya harap jangan sampai ada perpecahan antar krama banjar atas kasus ini," pinta Atang Bawono. **d**



Buleleng Dapat Jatah 2.000 Unit Bedah Rumah

SINGARAJA, NusaBali

Pemerintah Kabupaten Buleleng tahun ini patut tersenyum, karena mendapatkan jatah bedah rumah terbanyak di Bali jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada. Buleleng mendapatkan kuota sebanyak 2.000 unit bedah rumah yang akan dibagikan kepada masyarakat miskinnya yang tidak memiliki rumah layak huni. Selain 2.000 unit kuota dari pemerintah pusat, bedah rumah untuk masyarakat miskin di Buleleng juga akan

disumbangkan oleh Pemerintah Provinsi Bali sebanyak 446 unit dan dari Pemerintah Kabupaten Buleleng sebanyak 33 unit.

Kepala Dinas Sosial Buleleng, Gede Komang yang ditemui di ruang kerjanya, Jumat (3/2) siang, mengaku sejumlah kuota dari pemerintah pusat utamanya, akan menjalani proses verifikasi lebih lanjut oleh petugas di kabupaten. "Daftar nama yang ada itu nanti akan diverifikasi ulang, apakah mereka memang layak mendapatkan bantuan bedah rumah atau tidak, akan dijajagi oleh petugas kami satu per satu ke lapangan," ujar dia. Pihaknya pun mengatakan jumlah tersebut belum tentu valid semuanya. Karena ketika ada di lapangan dalam proses verifikasi sering ditemui sejumlah hambatan.



• NUSABALI/LILIK
KEPALA Dinas Sosial Buleleng,
Gede Komang,

Di antaranya, daftar nama yang ada, saat diverifikasi telah memiliki rumah layak huni. Permasalahan lainnya juga kadang muncul, nama yang diajukan, tidak memiliki lahan pribadi yang nantinya akan dipakai untuk membangun bedah rumah, sehingga bantuan tersebut tidak dapat terealisasi.

Menurut Gede Komang, realisasi bantuan bedah rumah dari pemerintah pusat maupun provinsi masih diarahkan ke kecamatan yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi. Seperti kecamatan Gerokgak, Tejakula dan

Sukasada. "Kita utamakan dulu di daerah yang nilai kemiskinannya sangat tinggi, sehingga warga yang memang tidak memiliki rumah layak huni, dapat lebih sejahtera setelah mendapat bantuan bedah rumah ini," imbuh dia.

Sementara itu pada tahun 2016 lalu, ada 4.251 unit, yang terdiri dari 468 unit bersumber dari APBD Buleleng, 3.123 unit dari Pemerintah Provinsi, 50 unit dari Pemerintah Pusat dan 610 unit dari CSR perusahaan. Satu unit bedah rumah dikerjakan dengan anggaran Rp 30 juta. Selain bantuan bedah rumah ditahun yang sama Buleleng juga mendapatkan bantuan rehab rumah sebanyak 3.189 unit rumah dari pemerintah pusat dengan nilai Rp 15 juta per unitnya. **k23**

Edisi : Sabtu, 5 Feb 2017

Hal : 4